



BP30KP

FEBRUARI 2025

**LAPORAN
BULANAN**

**PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
PAPUA**

Kantor BP30KP Provinsi Papua
*Lt. 4 Gedung Keuangan Negara, Jl.Ahmad Yani No.8 -
Jayapura Utara, Kota Jayapura - Provinsi Papua*





Ringkasan Eksekutif

Laporan Bulanan BP3OKP Provinsi Papua Induk periode Februari 2025 ini menyajikan ikhtisar capaian dan kegiatan Anggota dan Kelompok Kerja (POKJA) BP3OKP dalam mendukung percepatan pembangunan otonomi khusus di Papua. Pada bulan Februari, fokus utama Anggota BP3OKP Provinsi Papua adalah koordinasi dengan beberapa pihak terkait dengan Pelayanan Publik dan Administrasi Lembaga. Selain itu, POKJA BP3OKP juga melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya guna percepatan Pembangunan di Provinsi Papua.

Selama bulan Februari 2025, Anggota BP3OKP melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada rapat koordinasi MKKS SMK Se Tanah Papua dan menerima OMBUDSMAN dalam kaitan koordinasi peningkatan Pelayanan Publik. Kelompok Kerja (Pokja) BP3OKP Provinsi Papua melakukan beberapa kegiatan seperti : Fasilitasi Pemerintah Kota Jayapura terkait Program Pemenuhan Guru, Peningkatan Investasi lewat PKS dengan BANK Papua, dan Pendampingan Koperasi terkait Rencana Investasi Kelapa Sawit dan Ikan .

Ke depan, Anggota dan Pokja BP3OKP akan terus memprioritaskan percepatan implementasi RIPPP dan RAPPP lewat Tugas dan Fungsi SHEK dan penguatan kapasitas kelembagaan. Anggota dan Pokja BP3OKP juga akan lebih proaktif dalam menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mempercepat realisasi program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Papua. Laporan bulanan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Anggota dan Pokja BP3OKP dalam mendukung percepatan pembangunan otonomi khusus di Papua, serta menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.



**ANGGOTA BADAN PENGARAH PERCEPATAN,
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA**

ALBERTH YOKU, S.AG



KEGIATAN STRATEGIS

Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja) BP3OKP telah melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis sebagai berikut :

1. Anggota Badan

No	Kegiatan Strategis	Tujuan	Hasil
1.	Koordinasi Pelayanan Publik dengan OMBUDSMAN	Koordinasi Awal guna meningkatkan komunikasi antar lembaga	Rencana PKS
2.	Narasumber Rakor MKKS SMK Se Tanah Papua	Memberikan informasi umum tentang BP3OKP dan Program Papua Cerdas, serta menyampaikan Peran Penting SMK membangun Papua	Materi Telah disampaikan dan telah menerima masukan dari MKKS SMK Se Tanah Papua
3.	Penandatanganan PKS BP3OKP-BANK PAPUA	Proses Perubahan Payroll Gaji ke Bank Papua	Dokumen PKS telah diserahkan dan di tandatangani

2. Kelompok Kerja (Pokja)

No	POKJA	Kegiatan Strategis	Tujuan	Hasil
1.	Papua Cerdas	Penandatanganan Berita Acara Program Pemenuhan Guru TK/PAUD Pemerintah Kota Jayapura Oleh BP3OKP	Proses Persetujuan oleh BP3OKP agar Program Di masukan dalam Program yang akan dikerjakan Pemerintah	Dokumen telah di tandatangani dan telah diserahkan kembali ke Pemerintah Kota Jayapura
2.	Papua Cerdas	Rapat Koordinasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Se Tanah Papua	Menghadiri Undangan dan membantu Pimpinan menjadi Narasumber	Kegiatan telah dilaksanakan dan penguatan komunikasi antar Lembaga terlaksana
3.	Papua Cerdas	Penyerahan Hasil Rekomendasi Rakor MKKS SMK Se Tanah Papua	BP3OKP bisa memberikan rencana tindak lanjut	Dokumen telah diterima dan akan melakukan proses penindaklanjuti hasil rekomendasi
4.	Papua Produktif	Penandatanganan PKS BP3OKP-BANK PAPUA	Peningkatan Kapasitas Lembaga dalam meningkatkan Investasi dan mendorong Bank Papua menjadi Bank Devisa	Dokumen telah di tandatangani dan akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan strategis kedepannya
5.	Papua Produktif	Pendampingan Rencana Investasi Koperasi pada Kelapa Sawit dan Kelompok Nelayan Ikan	Memperkuat Kapasitas Koperasi dalam mempersiapkan rencana investasi	Terjalannya Komunikasi antar BP3OKP dan Koperasi terkait
6.	Papua Polhukam	Koordinasi Pelayanan Publik dengan OMBUDSMAN	Memperkuat Komunikasi antar Lembaga terkait Sistem Pengaduan Publik	Pembuatan Dokumen PKS dan Rencana Koordinasi Lebih Lanjut



REKOMENDASI

Berdasarkan Kegiatan Strategis yang dilakukan, anggota dan Kelompok kerja (pokja) memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

A. Anggota Badan

- Perlu dukungan untuk kerjasama pemindahan payroll Anggota dan Pokja
- Perlu dilakukan koordinasi dengan OMBUDSMAN terkait penguatan koordinasi antar lembaga

B. Pokja Papua Cerdas

- Perlu dilakukan koordinasi intens dengan Pemerintah daerah terkait program pemenuhan guru TK/PAUD
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait tindak lanjut rekomendasi

C. Pokja Papua Produktif

- Perlu dukungan Dana dan Kerja bagi Kelompok Nelayan untuk
- Fasilitas Kredit anggota nelayan (50-100 Juta / Anggota)
- Dukungan Pembiayaan kepada Koperasi dalam rangka pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
- Dukungan Pembiayaan 60 Juta Rupiah/Ha/Kepala Keluarga (KK)

D. Pokja Papua Polhukam

- Perlu dilakukan PKS dengan OMBUDSMAN terkait proses pengaduan.



KESIMPULAN

Laporan Bulanan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua, periode Februari 2025, menunjukkan komitmen dan upaya berkelanjutan dari Anggota Badan dan Kelompok Kerja (POKJA) dalam mendukung percepatan pembangunan otonomi khusus di Papua.

Selama periode ini, Anggota Badan telah melaksanakan koordinasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk Ombudsman RI, untuk meningkatkan pelayanan publik dan administrasi lembaga. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Papua menjadi langkah penting dalam proses perubahan sistem penggajian (payroll) dan peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan lembaga.

POKJA BP3OKP juga aktif dalam memfasilitasi program-program pembangunan di berbagai sektor. POKJA Papua Cerdas berperan dalam program pemenuhan guru TK/PAUD di Kota Jayapura dan menindaklanjuti hasil rekomendasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se-Tanah Papua. Sementara itu, POKJA Papua Produktif fokus pada peningkatan investasi melalui PKS dengan Bank Papua dan pendampingan koperasi dalam rencana investasi kelapa sawit dan sektor perikanan.

PENUTUP

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja BP3OKP Provinsi Papua dalam mendukung percepatan pembangunan otonomi khusus. Ke depan, BP3OKP akan terus berupaya meningkatkan efektivitas program-program pembangunan melalui penguatan kelembagaan, kemitraan strategis, dan implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).

LAMPIRAN

